

TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENGGAJIAN KARYAWAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KABUPATEN BANDUNG

by Ista Liani

Submission date: 15-Aug-2018 09:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 990049047

File name: UNIKOM__ISTA_LIANI_PUTRI_21315009_ARTIKEL.docx (68.08K)

Word count: 3151

Character count: 20625

TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENGGAJIAN KARYAWAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KABUPATEN BANDUNG

Pembimbing:

Jyanthi Octavia, S.E., M.M

Oleh:

ISTA LIANI PUTRI

21315009

Program Studi Diploma Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Komputer Indonesia

Email: istaalianiputri@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted on the body of the BKD Kabupaten Bandung. The existence of a problem that occurred in Bandung District BKD is still the onset delay salaries due to money transfer SP2D LS (warrant of Disbursements) from Dinas experience barriers due to an employee who borrowed funds Office to employees of the personal and sometimes there are some employees who are late paying arrers to the Office with a variety of reasons. The purpose of this study is to find out how employee payroll procedures, barriers that occur on the payroll of employees, as well as to know the effort on payroll employees in BKD Kabupaten Bandung. The methods used in this research is descriptive method. The technique of data collection

conducted this research field that studies i.e. done by direct field observations, interviews, documentation, as well as the study of librarianship. The research results showed that the resistance is happening is some of the borrowed funds Office employees for personal use so as to cause a shortage of funds for salary transfer salaries does not match the date promised to take those funds. And the Treasury on BKD Kabupaten Bandung himself scored only a list of employee salaries and revised the list of employee salaries only. And BKD Kabupaten Bandung did not make a report bookkepping for employees who borrow cash funds Office so misunderstandings end reporting later.

Keyword: Employee's Payroll

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Gaji atau upah mengambil peranan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan karena gaji merupakan faktor pendorong dalam kinerja karyawan sebuah perusahaan. Dimana kinerja yang bagus dapat menunjang produktivitas perusahaan. Agar upah dapat diterima sesuai dengan hak karyawan dan aktivitas perusahaan dapat berjalan lancar, maka perusahaan atau lembaga membutuhkan prosedur yang baik. Sistem adminstrasi penggajian merupakan proses yang menentukan tingkat

4
penggajian pegawai, memantau atau mengawasi, mengembangkan serta mengerjakan 2 alikan gaji pegawai.

Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manager, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana. Umumnya gaji dibayarkan secara tetap perbulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan

hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang dihasilkan. (Mulyadi, 2016 : 309)

Badan Keuangan Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati Bandung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung yang didalamnya terdapat fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah dan tahun 2016 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis BKD Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 206 – 2021. (Sumber BKD Kabupaten Bandung)

Adapun fenomena yang terjadi pada BKD adalah masih terjadinya keterlambatan mentransferkan uang gaji karyawan dikarenakan SP2D LS (Surat Perintah Pencairan Dana Langsung) dari Dinas mengalami hambatan karena adanya karyawan yang meminjam dana kantor untuk keperluan pribadi dan terkadang ada sebagian karyawan yang telat membayarkan tunggaknya ke kantor dengan berbagai alasan. Seperti contohnya tidak sesuai tanggal yang di janjikan untuk mengembalikan dana kas kantor tersebut, dan juga ada alasan dengan belum adanya dana yang cukup untuk mengembalikan pinjaman ke kantor. Serta SP2D LS sendiri tidak bisa tepat waktu untuk mentransferkan gaji karyawan kepada BKD (Badan Keuangan Daerah) karena mengalami kekurangan dana untuk mentransferkan gaji karyawan kepada BKD. Dalam setahun SP2D LS mengalami hambatan yang seperti ini terjadi 4x atau 5x dalam setahun dan ini yang menyebabkan keterlambatan dalam penanganan proses pencairan dana sering terjadi dan mengakibatkan kesalahpahaman diakhir pelaporan nanti. Hampir 60% karyawan meminjam dana kantor untuk beberapa keperluan pribadi padahal sudah diberi gaji pokok+tunjangan yang diberikan, seperti tunjangan istri, anak, beras, dsbnya. Pada peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) jika terlambat membayar tunggakan yang telah dipinjam dari kas kantor akan mendapatkan sanksi dengan memotong gaji karyawan sebesar 5% dari gaji karyawan yang diterima.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih lanjut dan dalam Laporan Tugas Akhir ini penullis akan tuangkan laporan dengan judul **“TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENGGAJIAN KARYAWAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penggajian karyawan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung ?
2. Bagaimana hambatan prosedur penggajian karyawan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung dalam mengatasi hambatan tersebut ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian tugas akhir ini untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang muncul pada prosedur penggajian karyawan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penggajian karyawan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada prosedur penggajian karyawan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan prosedur penggajian karyawan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Di harapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengadakan perbaikan yang terkait atau berhubungan dengan prosedur

penggajian karyawan dan hasil laporan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian tugas akhir dengan topik yang sama.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan dan dapat menjadi bahan referensi atau acuan penelitian bagi penulis selanjutnya, khususnya mahasiswa Universitas Komputer Indonesia program studi Akuntansi.

II. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Prosedur

Menurut Azhar Susanto (2013 : 264) mendefinisikan prosedur sebagai berikut :

"Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama".

2.2 Prosedur Penggajian Karyawan

Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 pasal 32 ayat 1, menyatakan bahwa :

"Bentuk isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Kemudian pada ayat 2 menyatakan bahwa SAP dimaksud disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP (Peraturan Pemerintah) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)".

Menurut Mulyadi (2016 : 392) prosedur penggajian karyawan adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu hadir dapat menggunakan daftar hadir biasa yang karyawan harus menandatangani setiap hadir dan pulang dari perusahaan. Pencatatan kartu jam hadir ini diselenggarakan untuk menentukan gaji karyawan.
2. Prosedur pencatatan waktu kerja, dalam perusahaan biasanya karyawan bekerja 8jam dalam suatu

1 hari kerja, jumlah hadir tersebut dirinci menjadi waktu kerja dalam tiap[hari. Dengan demikian waktu kerja ini dipakai sebagai dasar pembebanan biaya tenaga kerja.

3. Prosedur pembuatan daftar gaji karyawan, dalam prosedur ini fungsi pembuat daftar gaji adalah surat-surat keputusan peningkatan karyawan baru, kenaikan pangkat dan lain-lain.

2.3 Hambatan Prosedur Penggajian Karyawan

Berdasarkan Peraturan Undang - Undang (Pasal 94 UU No. 13/2003) sebagai berikut :

"Komponen gaji sendiri terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya gaji pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan³ tetap".

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.07/2009 sebagai berikut :

"Batas maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kekurangan anggaran atau dana terjadi karena adanya pengeluaran-pengeluaran biaya yang tidak produktif/tidak seharusnya dikeluarkan dan terjadinya kecurangan dalam keuangan".

2.4 Upaya Prosedur Penggajian Karyawan

Menurut Ong Teong Wan yang dikutip oleh Ruslan Efendy (2013 : 92) mendefinisikan sebagai berikut :

1. "Mengidentifikasi Masalah Untuk mendapatkan fakta, kita perlu menarik pendapat dengan mengklarifikasi dan mengkonfirmasi untuk memahami apa dan mengapa. Hanya saat menyatukan fakta-faktalah kita dapat menetapkan penyebab utama pelaku kinerja tidak dapat memenuhi target atau harapan.

2. Mencari Solusi

Sesudah penyebab utama dimengerti dan diterima, pelaku kinerja akan lebih mudah mengusulkan solusi atau mengkontribusikan ide untuk pemecahan masalah secara bersama. Biasanya, begitu penyebab utama ditetapkan dan diterima, pelaku kinerja dapat memberikan solusi untuk mencegah serta perbaikan yang logis. Umpan balik yang membangun juga dapat digunakan untuk menyempurnakan solusi.

3. Implementasi Solusi

Implementasi akan menjadi lebih mudah bila ada rasa kepemilikan terhadap solusi. Oleh karena itu, bila solusi tidak dijadikan sebagai suatu yang harus ditaati, tapi datang dari pelaku kinerja atau merupakan sesuatu yang dikembangkan bersama, akan muncul komitmen. Implementasi akan lebih cepat.

4. Menindaklanjuti Solusi

Dibanyak kasus saat tidak ada rasa kepemilikan solusi, pemberdayaan dan kendali diri akan menjadi bentuk tindak lanjut terbaik”.

2.5 Pengertian Gaji

Menurut Mulyadi (2016 : 309) mendefinisikan gaji adalah sebagai berikut :

“Gaji umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manager, sedangkan upah umumnya merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana. Umumnya gaji dibayarkan secara tetap perbulan, sedangkan upah dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja atau jumlah satuan produk yang dihasilkan”.

III. Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi. Objek dalam penelitian ini yaitu penggajian karyawan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

3.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan fakta yang diperlukan berkaitan tujuan dan judul yang diambil dalam tugas akhir. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan penggajian karyawan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk **mendapatkan dan** mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mempelajari dan mengadakan pengamatan secara langsung ke dalam perusahaan untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat mendukung dan melengkapi hasil penelitian pada BKD Kabupaten Bandung.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara antara penulis dan pihak yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan Bidang Perbendaharaan pada BKD Kabupaten Bandung.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara pengumpulan dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang akan diteliti. Dokumen yang diberikan bidang perbendaharaan kepada penulis

yaitu, rekap daftar gaji karyawan, SP2D LS, SPP dan SPM.

4. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai bahan pustaka yang relevan dan referensi lain yang berhubungan dengan materi yang akan dikaji.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh dan memiliki informasi jelas tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yaitu Dimana sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui survey lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian. Yaitu melalui buku-buku mengenai penggajian karyawan.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Analisis Deskriptif

4.1.1 Prosedur Penggajian Karyawan Pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung

Prosedur penggajian karyawan pada BKD Kabupaten Bandung dimulai dari :

- Penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana) digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam waktu tertentu. Informasi dalam SPD menunjukan secara jelas alokasi tiap kegiatan.
- Kemudian dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar).

- Proses penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) adalah tahapan penting dalam pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPD (Surat Pencairan Dana dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
- SP2D LS (Surat Perintah Pencairan Dana Langsung) adalah surat yang digunakan untuk mencairkan dana lewat Bank yang ditunjuk berdasarkan SPM.
- Setelah dibuatkan cek oleh Bank BJB lalu dicairkan dan Bank BJB membuatkan bukti cek bahwa cek sudah dicairkan lalu setelah itu Bank BJB mentransferkan ke rekening BKD Kabupaten Bandung
- Setelah itu BKD Kabupaten Bandung mentransferkan gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan.
- Setelah diterimanya gaji karyawan ke rekening masing-masing, staf perbendaharaan mencetak daftar gaji karyawan.
- Setelah staf perbendaharaan mencetak daftar gaji karyawan kemudian ditandatangani oleh Kepala Bidang Administrasi Pembendaharaan dan Kepala Bidang Pembendaharaan BKD.

4.1.2 Hambatan dalam pelaksanaan prosedur penggajian karyawan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung

Disebabkan adanya beberapa karyawan yang meminjam dana kantor untuk keperluan pribadi sehingga menyebabkan kekurangan dana untuk mentransferkan gaji karyawan karena tidak sesuai tanggal yang dijanjikan untuk mengembalikan dana tersebut.

4.1.3 Upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada prosedur penggajian karyawan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung

Dengan membuat surat revisi daftar gaji untuk Bendahara Pengeluaran, Kepala Bidang Pembendaharaan dan diberikan ke kantor Dinas untuk menindak lanjuti dan selain itu saat proses persetujuan dari Bendahara Pengeluaran, Kepala Bidang Perbendaharaan Dinas, bagian perbendaharaan di BKD meminta bantuan kepada Bank BJB untuk dapat menanggulangi pada hambatan penggajian karyawan tersebut pada masa persetujuan dari Pemda untuk meminjam dana dari Bank BJB.

4.2 Pembahasan

Dalam pembahasan ini, penulis akan membahas tentang penggajian karyawan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung. Dengan beegitu, akan diketahui apakah BKD Kabupaten Bandung telah berjalan dengan baik dan benar atau belum sesuai dengan peraturan Pemerintah Daerah yang berlaku di Indonesia.

4.2.1 Prosedur penggajian karyawan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung

Menurut Mulyadi (2013:392) prosedur akuntansi penggajian yaitu:

Prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan waktu kerja, proses pembuatan daftar gaji karyawan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung bahwa prosedur penggajian karyawan sudah sesuai dengan teori Mulyadi yaitu adanya prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pencatatan waktu kerja dan prosedur pembuatan daftar gaji. Namun selain itu, menurut bagian perbendaharaan BKD Kabupaten Bandung prosedur penggajian karyawan dimulai dari penerbitan

SPD (Surat Penyediaan Dana) digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam waktu tertentu. Informasi dalam SPD menunjukan secara jelas alokasi tiap kegiatan, kemudian dibuatkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan dibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar), proses penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar) adalah tahapan penting dalam pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPD (Surat Pencairan Dana dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SP2D LS (Surat Perintah Pencairan Dana Langsung) adalah surat yang digunakan untuk mencairkan dana lewat Bank yang ditunjuk berdasarkan SPM, setelah dibuatkan cek oleh Bank BJB lalu dicairkan dan Bank BJB membuatkan bukti cek bahwa cek sudah dicairkan lalu setelah itu Bank BJB mentransferkan ke rekening BKD Kabupaten Bandung, setelah itu BKD Kabupaten Bandung mentransferkan gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan, lalu setelah diterimanya gaji karyawan ke rekening masing-masing staf perbendaharaan mencetak daftar gaji karyawan, setelah itu di tanda tangani oleh Kepala Bidang Administrasi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung.

4.2.2 Hambatan dalam pelaksanaan prosedur penggajian karyawan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 Pasal 10 ayat 2 komponen gaji sendiri terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya gaji pokok sedikit-dikitnya 75% dari

jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap.

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.07/2009 Tentang Batas maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kekurangan anggaran atau dana terjadi karena adanya pengeluaran-pengeluaran biaya yang tidak produktif/tidak seharusnya dikeluarkan dan terjadinya kecurangan dalam keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti oleh penulis pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung bahwa hambatan dalam pelaksanaan prosedur penggajian karyawan berbeda dengan teori peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.07/2009 yang menjelaskan kekurangan dana terjadi karena adanya pengeluaran biaya yang tidak produktif. Sedangkan menurut pelaksanaannya kekurangan dana yang terjadi di BKD Kabupaten Bandung terjadi karena adanya karyawan yang meminjam dana perusahaan untuk keperluan pribadi, seperti contoh: meminjam dana untuk istri yang akan melahirkan, biaya untuk menikah untuk karyawan BKD yang akan menikah. Itu semua termasuk kedalam cuti, dan itu diluar tanggungan BKD Kabupaten Bandung dan mereka meminjam dana tersebut dengan alasan kekurangan dana dari gaji karyawan yang mereka dapatkan.

4.2.3 Upaya Yang Dilakukan Dalam Terjadinya Prosedur Penggajian Karyawan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung

Menurut yang dikemukakan oleh Ong Teong Wan yang dikutip oleh Ruslan Efendy (2013:92) yaitu : Mengidentifikasi masalah, mencari solusi, implementasi solusi dan menindaklanjuti solusi sudah sesuai dengan teori Ong Teong Wan untuk

mengatasi hambatan yang terjadi upaya yang dilakukan BKD Kabupaten Bandung. Namun selain itu upaya dengan membuat surat revisi daftar gaji untuk Bendahara Pengeluaran, Kepala Bidang Administrasi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Perbendaharaan. Selain itu saat proses persetujuan dari Bendahara Pengeluaran, Kepala Bidang Administrasi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung meminta bantuan kepada Bank BJB untuk dapat menanggulangi pada hambatan penggajian karyawan tersebut pada masa persetujuan dari Bendahara Pengeluaran untuk meminjam dana dari Bank BJB.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penggajian karyawan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada masalah yang terjadi dengan terjadinya SP2D LS (Surat Perintah Pencairan Dana Langsung) yang dibuat oleh Dinas mengalami hambatan karena adanya karyawan yang meminjam dana kantor untuk keperluan pribadi sehingga menyebabkan kekurangan dana dan tidak sesuai tanggal untuk mentransferkan gaji karyawan kepada BKD Kabupaten Bandung.
2. Hambatan dalam prosedur penggajian karyawan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung yaitu kekurangan dana yang terjadi di BKD karena adanya karyawan yang meminjam dana perusahaan untuk keperluan pribadi, seperti contoh: meminjam dana untuk istri yang akan melahirkan,

biaya untuk menikah untuk karyawan BKD yang akan menikah. Itu semua termasuk kedalam cuti, dan itu diluar tanggungan BKD Kabupaten Bandung dan mereka meminjam dana tersebut dengan alasan kekurangan dana dari gaji karyawan yang mereka dapatkan.

3. Upaya yang dilakukan terjadinya hambatan dalam prosedur penggajian karyawan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung dalam kekurangan dana yaitu dengan membuat surat revisi daftar gaji untuk Bendahara Pengeluaran, Kepala Bidang Administrasi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Perbendaharaan. Selain itu saat proses persetujuan dari Bendahara Pengeluaran, Kepala Bidang Administrasi Perbendaharaan dan Kepala Bidang Perbendaharaan BKD Kabupaten Bandung meminta bantuan kepada Bank BJB untuk dapat menanggulangi pada hambatan penggajian karyawan tersebut pada masa persetujuan dari Bendahara Pengeluaran untuk meminjam dana dari Bank BJB.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung, maka saran yang dibuat oleh penulis yaitu apabila terjadi suatu hambatan dalam SP2D LS (Surat Perintah Pencairan Dana Langsung) sebaiknya BKD Kabupaten Bandung harus memiliki laporan pembukuan untuk para karyawan yang memiliki tunggakan ke kantor agar tidak terjadi secara terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Offset. Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Cetakan Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharismi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azhar Susanto. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.

Darmadi, Hamid. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta

Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali

Mulyadi. 2016. Cetakan Kedua. Sistem Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat
Yogyakarta : CV

Rivai, Veithzal, dkk. 2013. *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*. Edisi 1. Cetakan 1. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

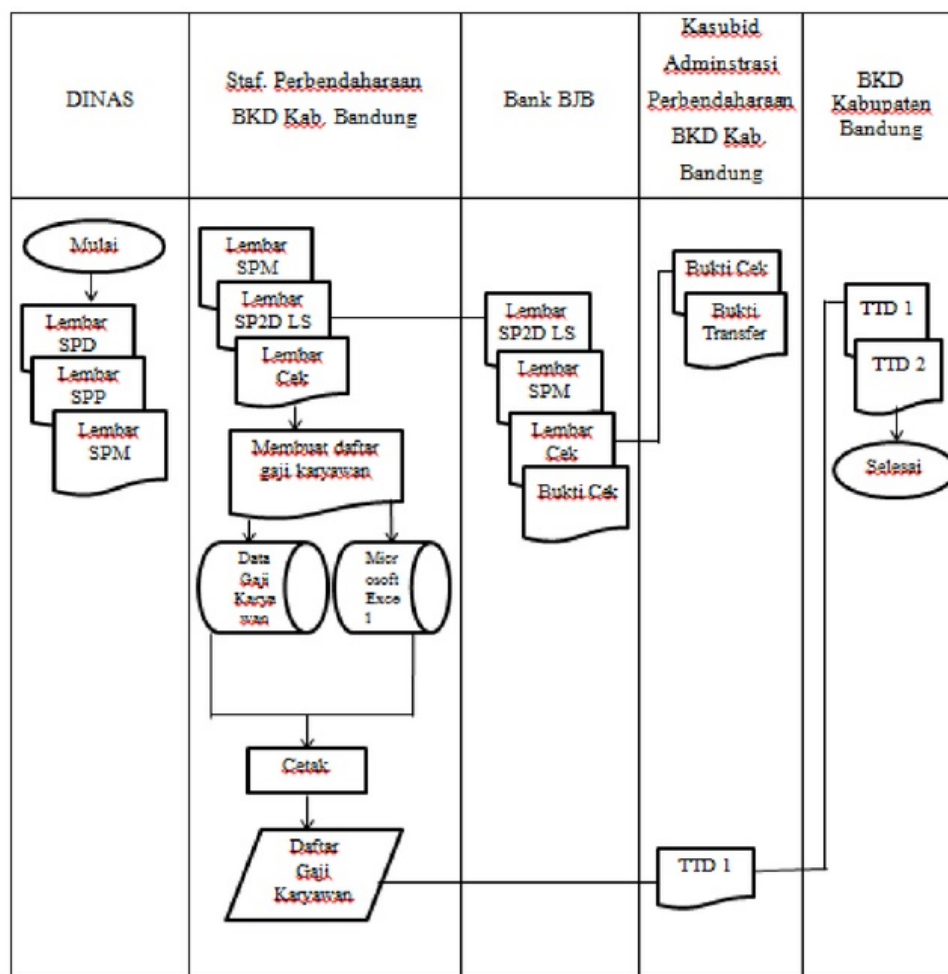
BKD Kabupaten Bandung, Aktivitas Perusahaan, 3 Mei 2018,
<http://www.bandungkab.go.id/arsip/profil-badan-keuangan-daerah>

Biro Hukum Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 19 Mei 2018,
<https://betterwork.org/in-labourguide/wp-content/uploads/2012/05/F-KEPMOMT2004->

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 Tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi, 19 Mei 2018,
<http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PMK%20138%202013.pdf>

Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo, Ketenagakerjaan, 20 Mei 2018,
http://kemenperin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf

Lampiran



Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung

Gambar 4.3
Flowchart Penggajian Karyawan BKD Kabupaten Bandung

TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENGGAJIAN KARYAWAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD) KABUPATEN BANDUNG

ORIGINALITY REPORT

11%	11%	4%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	elib.unikom.ac.id Internet Source	5%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	2%
3	info-peraturan.blogspot.com Internet Source	2%
4	eprints.uns.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%